

Islam dalam Politik Luar Negeri Singapura

Sugeng Riyanto; Surwandono; Tulus Warsito; Bambang Cipto

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Bantul, DI Yogyakarta 55183, Indonesia

riyanto_sugeng@yahoo.com

Diserahkan: 6 September 2018; diterima: 21 Maret 2019

Abstract

The Malay Muslim community is a minority group in Singapore, which consist of 14.3 percent, while Chinese ethnic dominates with 76 percent of the Singapore total population. The previous studies on the minority in Southeast Asia such as Thailand, the Philippine, and Myanmar showed that mostly the Muslim minority was treated as a marginal community and politically pressured. This study seeks whether the Malay Muslim in Singapore has been treated as well as in neighbor or threated on the contrary with different position and role in Singapore's politics. This research used a qualitative method, and the data was collected through interview, news, and literatures. The research demonstrated that although being a minority in Singapore, Islam is a determinant factor of its foreign policy, since Islam has contributed to the political dynamic such as communal riots. Therefore, Singapore addressed moderate policies toward Muslim through accommodation of Islamic friendly policies. Besides, Singapore also addressed accommodative foreign policy toward Malaysia, Indonesia, and the representation of world Islamic society surrounded Singapore.

Keywords: communal riots, foreign policy, moderate policy, accommodative policy.

Abstrak

Komunitas Muslim Melayu merupakan kelompok minoritas di Singapura yang terdiri dari 14,3 persen. Sedangkan etnis Cina mendominasi sekitar 76 persen dari total penduduk Singapura. Studi sebelumnya tentang minoritas di Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, dan Myanmar menunjukkan bahwa sebagian besar minoritas Muslim diperlakukan sebagai komunitas marginal dan mendapat tekanan secara politis. Studi ini bertujuan mengetahui apakah Muslim Melayu di Singapura telah diperlakukan sebaik di negara tetangga atau justru diposisikan berbeda dalam politik Singapura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan data dikumpulkan melalui wawancara, berita, dan literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun menjadi minoritas di Singapura, Islam adalah faktor penentu kebijakan luar negerinya, karena telah berkontribusi terhadap dinamika politik seperti kerusuhan komunal. Oleh karena itu, Singapura membahas kebijakan moderat terhadap Muslim melalui akomodasi melalui beberapa kebijakan ramah Islam. Selain itu, Singapura juga memberlakukan kebijakan luar negeri yang akomodatif terhadap Malaysia, Indonesia, dan perwakilan masyarakat Islam dunia yang mengelilingi Singapura.

Kata kunci: kerusuhan komunal, kebijakan luar negeri, kebijakan moderat, kebijakan akomodatif.

PENDAHULUAN

Singapura dikenal sebagai negara multi-etnis, di mana etnis Cina menjadi mayoritas dengan porsi 78 persen, disusul Melayu (Islam) sebesar 14 persen, India 9 persen, dan sisanya terdiri dari berbagai etnis. Dalam komposisi seperti ini, Islam dapat di kategorikan sebagai kelompok minoritas. Etnis melayu sangat identik dengan Islam mengingat 99 persen lebih etnis Melayu beragama Islam, meski tidak sedikit etnis lain yang beragama Islam (Aljunied, 2009)

Melihat pengalaman berbagai negara, sebagai minoritas, Islam selalu dianggap sebagai sebuah masalah dalam proses pembangunan kebangsaan. Di Filipina masih bergulat dengan persoalan

kelompok Islam di Mindanau, sementara di Thailand, pemerintah Bangkok masih berusaha mencari penyelesaian terbaik atas kasus Islam di Thailand Selatan, termasuk Pattani. Sedangkan kasus terbaru adalah pergolakan Islam (Rohingya) di Myanmar yang telah mengundang perhatian dunia.

Tulisan ini ingin melihat posisi Islam di Singapura; lebih lanjut, ingin melihat pengaruh Islam dalam proses kebijakan luar negerinya, mengingat Singapura dikepung oleh dua negara yang mayoritas berpenduduk Islam, yakni Malaysia dan Indonesia. Salah satu kajian menarik tentang kebijakan luar negeri Singapura dijelaskan secara sistematis oleh Michael Leifer (Leifer, 2000). Dalam pandangannya, politik luar negeri Singapura sangat dipengaruhi oleh kondisinya yang rentan (*vulnerable*). Kerentanan ini secara garis besar disebabkan oleh kondisi geopolitik di mana Singapura memiliki ukuran yang sangat kecil dengan kelangkaan sumber alam, serta posisinya yang terjepit antara Indonesia dan Singapura. Namun dalam kajian ini, belum diutarakan tentang peranan Islam sebagai salah satu komponen penting dalam dinamika politik Singapura.

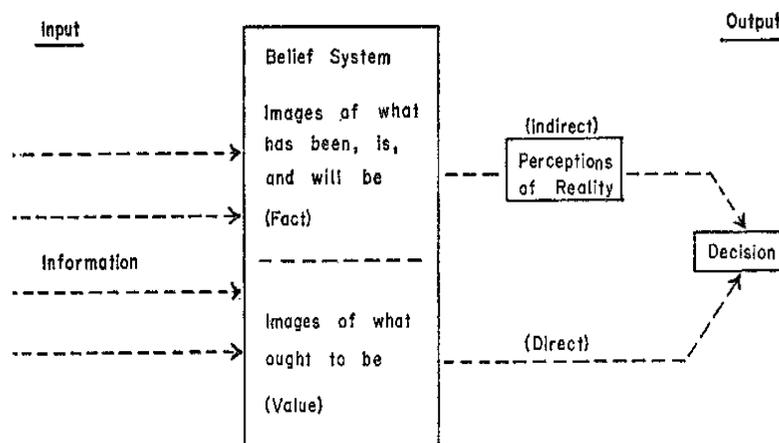
KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam sebuah negara otoritarian, peran pemimpin dalam menentukan kebijakan menjadi signifikan. Bisa jadi keputusan yang dibuat merupakan hasil kerja pemikiran pemimpin, yang tidak terlalu menghiraukan peran lembaga atau organ lain dalam struktur kepemimpinan negara. Hierarki kekuasaan justru mempunyai andil terbesar dalam akselerasi pembuatan keputusan, di mana struktur di bawah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh struktur di atasnya.

Apa yang diputuskan oleh pemimpin, dipengaruhi oleh persepsi pemimpin tentang fakta yang dihadapinya. Dalam kaitan ini Robert Jervis menambahkan bahwa *“the tendency toward perception makes leaders interpret their own decision as responses the objectives conditions, while attributing the action of foreign rivals to a hostile disposition”* (Dougherty & Pfallgraff, 2001: 555). Pemimpin mempunyai otoritas dan logika tersendiri dalam menafsir situasi dan menerjemahkannya dalam kebijakan-kebijakan.

Menjadi penting untuk melihat alur dari persepsi ini untuk kemudian dikonversi menjadi sebuah kebijakan. Menurut Holsti, *“decision makers act upon their definition of the situation and their images of states—others as well as their own. These images are in turn dependent upon the decision maker’s belief system, and these may or may not be accurate representation of reality”* (Holsti, 1962: 244). Peran para pembuat keputusan luar negeri, sangat dipengaruhi oleh persepsinya tentang situasi dan keadaan, meskipun persepsi atau penilaian tersebut belum tentu akurat. Holsti memperjelas tentang kerangka kerja sebagai berikut.

Gambar 1. Hubungan antara sistem keyakinan dan pembuatan keputusan



Sumber: Holsti (1962: 244)

Terdapat tiga komponen yang menentukan keputusan, yakni, pertama, sistem keyakinan meliputi citra tentang apa yang telah, sedang, dan akan terjadi; kedua, citra tentang bagaimana seharusnya sesuatu terjadi; dan ketiga, persepsi tentang realitas. Pencitraan seseorang atas apa yang telah, sedang, dan akan terjadi akan memunculkan persepsi seseorang tentang realitas, dan inilah yang pada akhirnya dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang akan di ambil.

Untuk memperdalam kajian ini, maka digunakan teori tentang ideosinkretisme (Anugerah, 2016), yakni hal-hal yang memengaruhi pandangan seseorang tentang dunia yang meliputi keluarga, pendidikan, pengalaman pribadi, dan lingkungan sekitar. Ideosinkretisme diartikan sebagai persepsi elit yang menjadi fondasi keputusan yang akan dibuat. Dengan kata lain, keputusan tidak dibuat di ruang hampa, tetapi ia terkait pada apa yang melatarbelakanginya. Sebagai contoh adalah konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang akomodatif. Sementara politik yang otoriter akan menghasilkan hukum yang konservatif (Kamsi, 2017).

Menurut Anugerah, ada beberapa faktor yang memengaruhi persepsi elit tentang situasi sosial politik. Pertama adalah latar belakang keluarga yang mencakup status sosial, ekonomi, dan hubungan sosial keluarga tersebut dengan masyarakat lain. Hal lain yang berpengaruh di sini adalah situasi hubungan keluarga tersebut (Anugerah, 2016).

Kedua adalah latar belakang pendidikan. Pendidikan memberikan kontribusi tidak sekedar pada pemikiran seseorang tetapi juga pada cara hidup. Seseorang yang berpendidikan rendah dan berpendidikan tinggi pastilah mempunyai cara pandang yang berbeda tentang dunia. Perlu digarisbawahi bahwa terdapat juga faktor 'school' yang berlaku dalam dunia pendidikan tersebut yang berpengaruh pada pola pikir seseorang. Pendidikan tidak sekedar menyangkut pada masalah pendidikan formal, namun juga pendidikan non formal seperti buku bacaan maupun teman diskusi.

Faktor ketiga adalah pengalaman dan pembelajaran. *Experience* atau pengalaman mampu membentuk watak seseorang. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda, dan pengalaman tersebut memberikan spektrum gaya berpikir seseorang. Misalnya saja ketika masa kecil seseorang diperlakukan secara tidak baik oleh ayahnya, besar kemungkinan ketika beranjak dewasa ia akan membenci seorang ayah. Ini disebabkan oleh cara berpikir anak tersebut yang berdasar pada pengalaman pahitnya. Seorang mahasiswa yang aktif mengikuti gerakan para aktivis, akan mempunyai cara pandang yang berbeda dengan mereka yang hanya berkulat pada buku dalam menyikapi realitas sosial di lingkungannya.

Keempat, adalah afiliasi elit atau pemimpin. Dalam sebuah sistem politik yang menjunjung tinggi norma demokrasi, persepsi seseorang sangat ditentukan oleh ideologi partai di mana ia berafiliasi. Para presiden Amerika Serikat dari Partai Republik akan mempunyai kebijakan luar negeri yang berbeda dengan presiden yang berasal dari Partai Demokrat. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh garis besar partai tempat mereka berafiliasi. Partai Republik lebih cenderung menggunakan opsi militer dalam kebijakan luar negerinya, sedangkan partai Demokrat cenderung untuk mengusung isu hak asasi manusia.

METODE RISET

Tulisan ini disusun dari penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dan cara-cara lain dari metode kuantitatif. Lebih lanjut, penelitian kualitatif adalah penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang koheren. Penelitian kualitatif juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman (Bakri, 2016).

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tentang dunia di sekitar kita, sehingga menuntut peneliti untuk memberikan fokus pada makna dan proses yang membentuk fenomena sosial. Oleh karenanya, penelitian kualitatif dilakukan melalui studi mendalam atas suatu fenomena sosial dari suatu daerah, kelompok, atau individu tertentu. Metode kualitatif yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan beragam alat dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data yang datang dalam bentuk bahasa lisan atau tertulis yang tidak diformalkan menjadi angka dan kemudian menganalisisnya (Bakri, 2016).

Metode kualitatif merujuk pada pengumpulan data dan strategi atau teknis analisis data-data yang bukan angka (Bakri, 2016). Data-data tersebut dapat berbentuk dokumen primer, yakni dokumen asli (*original*) yang ditulis oleh individu yang mempunyai akses langsung ke informasi yang digambarkan, atau mereka yang langsung mengalami peristiwa tersebut. Dokumen juga dapat berbentuk dokumen sekunder, yakni dokumen yang mengacu pada dokumen primer, yaitu dokumen yang diperoleh oleh individu yang tidak hadir dalam suatu kejadian, tetapi menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan membaca dokumen primer. Dalam penelitian tersebut, data primer didapat dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber di Singapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ISLAM DI SINGAPURA

Islam di Singapura identik dengan etnis Melayu dan oleh karenanya, penyebutan Islam pada konteks Singapura sering berkonotasi Melayu, demikian juga sebaliknya. Hal ini terjadi mengingat hanya satu persen etnis Melayu beragama bukan Islam. Meski demikian tidak sedikit etnis non Melayu yang beragama Islam. Beberapa argumen yang menguatkan pendapat ini antara lain dari Haikal dan Yahaya.

It is made up of Malays, Indians, Arabs, Chinese, and other ethnic group. According to 1990 census, part of the 0.3% (categorized as other religions) of the Chinese community, 99.6% of the Malay community, 27.0% of the Indian community, and 24.7% of Other Ethnic Group were recorded as Muslims (Haikal & Yahaya, 1996: 435).

Selain itu, Khaerudin Aljunied mempertegas bahwa Muslim di Singapura identik dengan Melayu. Menurutnya, “*Annual reports of the colonial administration of Singapore for the years 1947 through 1957 claimed that an ‘enumeration of religions has not been made and is indeed scarcely possible. Out of an estimated figure of more than 100,000 persons, the Malays ‘are almost without exception Muslim’*” (Aljunied, 2009: 9). Oleh karenanya, penyebutan Melayu merepresentasikan Islam.

Seperti halnya di negara yang lain di Asia Tenggara, Islam di Singapura disebarkan oleh para pedagang dari Gujarat India. Teori ini diusung oleh para peneliti Belanda yakni Pijnappel, Snouck Hurgronje, dan Moquette. Menurut mereka, Islam datang ke Nusantara, termasuk Melayu, di antaranya dibawa oleh para pedagang dari Gujarat India. Argumen dari teori ini adalah adanya persamaan Mazhab dan Batu Nisan. Pada umumnya, dua komunitas Muslim (Gujarat dan Nusantara) menganut Mazhab Syafi’iyah. Teori ini dikuatkan oleh adanya persamaan batu nisan yang ditemukan di kedua area tersebut. Misalnya yaitu bentuk-bentuk nisan di Pasai, semenanjung Malaya, maupun di Gresik (Sudrajat, 2015).

Meskipun sekarang ini didominasi oleh etnis Cina, awalnya penduduk asli Singapura adalah Melayu. Menurut Aljunied, kaum Melayu adalah: “*Malays who have lived in the Colony for several generations or have moved there from the Peninsula and Immigrants from Indonesia (mainly Java and Bawean) who settled in the Island for one, two or three generations*” (Aljunied, 2006). Namun ada juga yang

menengarai bahwa sebenarnya penduduk asli Singapura adalah orang laut. Keberadaan mereka yang sedikit kini mulai terpinggirkan.

The Malays of course were the original inhabitants of Singapore Island (excepting a small number of orang laut), although their numbers were very small in the early days. For some time after the founding of the colony the Malays predominated numerically, but they rapidly lost this position as the influx of Chinese settlers began and accelerated (Clammer, 1981).

Seiring dengan masa kolonialisme Inggris yang membutuhkan tenaga kerja besar-besaran, proses imigrasi pun tak terhindarkan. Orang-orang dari sekitar Singapura mulai berdatangan. Pada awal era kekuasaan Sir Stamford Raffles jumlah etnis Melayu masih sekitar 50 persen, disusul oleh etnis Cina, India, dan Arab. Tahun 1830, beberapa tahun setelah pendirian Singapura 1819, etnis Cina telah menjadi yang terbesar mencapai 53 persen. Haikal dan Yahaya menggambarkan situasi imigran yang tak terkontrol pada masa itu hingga melampaui batas kuota yang ditentukan. Dan ketika kaum imigran tersebut bukanlah etnis Melayu, dengan sendirinya memperkecil persentase Melayu di Singapura (Haikal & Yahaya, 1996).

Posisi etnis Melayu kian lama kian terpinggirkan, tidak hanya dalam skala jumlah, tetapi juga dalam peran sosial politik maupun budaya. Orang Melayu kalah bersaing dengan orang Cina terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Ketika Partai Tindakan Rakyat (PAP) memenangkan pemilu pada tahun 1959 (sebelum kemerdekaan), dominasi etnis Cina kian tak tertahankan, hingga kaum Muslim Melayu mengalami keterpinggiran (Rahim, 1998). Hal tersebut berlangsung hingga pasca kemerdekaan Singapura tahun 1965. Posisi Melayu dalam kancah ekonomi cenderung masuk dalam kategori miskin, tertinggal dalam masalah pendidikan, dan kecil peran politiknya dalam kabinet maupun parlemen. Stigma keterbelakangan terasa melekat pada Muslim Melayu, tertinggal oleh etnis India maupun Cina.

Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Singapura

Sejatinya, politik luar negeri merupakan kepanjangan dari politik dalam negeri. Politik luar negeri dengan demikian, merupakan fungsi dari politik dalam negeri atau sebagai salah satu alat untuk memenuhi kepentingan dalam negerinya. Politik luar negeri didesain untuk memenuhi kebutuhan yang tak mampu dicukupi dari sumber-sumber dalam negeri. Pada sisi yang lain, politik luar negeri juga ditentukan oleh lingkungan internasionalnya ke area mana kebijakan itu diarahkan (Plano & Olton, 1967).

Terdapat tiga elemen pokok dalam kepentingan nasional Singapura di antaranya jaminan keamanan nasional, kesejahteraan ekonomi, dan pembentukan identitas nasional. Sebagai sebuah negara yang baru saja merdeka, Singapura dihadapkan pada masalah keamanan nasional. Hal ini dapat dilihat dari sisi geografis di mana untuk ukuran sebuah negara rerata di Asia Tenggara, Singapura termasuk sangat kecil yang hanya memiliki jarak 40 km dari timur ke barat dan 25 km dari utara ke selatan (Sadasivan, 2007).

Sementara itu Ganesan menengarai bahwa prinsip-prinsip politik luar negeri Singapura selalu berpijak pada empat prinsip utama yaitu, *vulnerability and sovereignty principle*, *demography*, *strategic location*, dan *resource base* (Ganesan, 1992). Kerentanan memang selalu menjadi tema utama dalam setiap politik luar negeri Singapura, oleh sebab sebuah negara yang ukurannya sangat kecil, tidak mempunyai banyak persiapan untuk merdeka dan tidak pula mungkin bergabung kembali dengan Malaysia.

Mengenai arti penting ini Lee Kuan Yew menyatakan, "*External Affairs are a matter of life and death. Isolation from the growing body of Afro-Asian opinion and identification with imperialist and colonialist nations must in the end mean death. For us life must mean a growing identification with the hopes and aspirations of the*

political attitudes of Afro Asian countries” (Chee, 1969: 178). Singapura sangat berhati-hati dalam menjalankan kebijakan luar negerinya.

Menurut Balaji Sadasivan, prinsip politik luar negeri Singapura adalah menjalin dengan sebanyak mungkin mitra agar potensi ekonomi dapat dicapai sedemikian rupa. *“To be friends with all the countries of the world and to make ourselves useful to others. And (2) To be a good international citizen in the global community”* (Sadasivan, 2007). Hal ini dilakukan karena dalam prinsip ekonomi perdagangan, mitra merupakan faktor terpenting untuk mendapatkan keuntungan.

Terkait dengan Perang Dingin yang sedang berkecamuk pada saat awal kemerdekaan, Singapura tidak tergoda dengan aliansi terhadap blok Barat maupun Timur. Berpihak pada satu sisi akan menjebak Singapura pada situasi politik yang tidak menguntungkan untuk melangsungkan proses perdagangan. Kebijakan non aliansi (non blok) menjadi pilihan yang paling rasional. Hal ini seperti terungkap dari pernyataan Menteri Keuangan Lim Kim San dalam laporan nota keuangan di hadapan parlemen bahwa, *“Our policy of neutrality, non-alignment between the two power blocs together with an active identification with the Afro-Asian world gives us a good start with the growing consumers' world in Afro-Asia. Trade missions will soon be sent to these market”* (Chee, 1969).

Peranan Lee Kuan Yew

Holsti berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara sangat ditentukan oleh citra atau *image* seorang pemimpin terhadap negara lain (Holsti, 1962). Citra ini akan memengaruhi cara kerja seseorang atau cara kalkulasi seseorang atas sebuah situasi, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam kasus ini Lee Kuan Yew adalah tokoh di balik skenario terhadap kebijakan luar negeri Singapura. Tanpa mengabaikan peran dari menteri Luar Negeri Sinathambi Rajaratnam, Lee Kuan Yew adalah peletak dasar arah kebijakan luar negeri Singapura. Sebagai seorang pendiri Singapura, Lee Kuan Yew merupakan kunci sentral dalam mendesain arah pembangunan Singapura. Strategi pembangunan Singapura didasarkan atas persepsional Lee Kuan Yew terhadap lingkungan strategis sekitarnya. Penerjemahan Lee Kuan Yew atas lingkungan sekitar akan berpengaruh besar pada desain kebijakan, termasuk di antaranya adalah kebijakan luar negeri. Pada bagian lain Alan Chong berpendapat,

As Singapore’s first Prime Minister and the point man in negotiating decolonization from Britain in the late 1950’s and early 1960s, Lee Kuan Yew carries an aura of being one of the pioneers of the island state’s foreign policy. His political personality appears to have been directly mapped onto his steerage of foreign policy: cold unflinching appraisal of one’s circumstances, and self-reliance in designing one’s survival strategies, but only up to the point that external parties can be persuaded that it is in their conjoined interests to partner Singapore in pursuing win-win collaborations (Chong, 2015).

Oleh karenanya, pemahaman tentang politik luar negeri Singapura tak dapat dilepaskan dari peran Lee Kuan Yew. Dialah yang merencanakan, mengeksekusi, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan luar negeri Singapura. Keberhasilannya dalam mengorganisir Partai Tindakan Rakyat serta membangun Singapura dari negara berkembang hingga menjadi negara maju, menjadikannya tokoh nomor satu bahkan hingga akhir hayatnya.

Lee Kuan Yew memang dikenal sebagai sosok yang sangat pragmatis (Klingler-Vidra, 2012) dan penuh pertimbangan atau kalkulasi untung dan rugi. Meskipun demikian, cara pandangnya tentang sesuatu juga akan menentukan kebijakan yang akan diambil. Termasuk di sini adalah cara pandangnya terhadap Islam, agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Melayu baik di Malaysia maupun di

Singapura. Secara ringkas, pandangan Lee Kuan Yew terhadap Islam yang direpresentasikan oleh Islam Melayu mempunyai kecenderungan yang negatif.

Dalam sebuah orbituari yang diterbitkan oleh The Strait Times Press, Lee Kuan Yew sebenarnya merasa tidak yakin apabila Singapura dapat hidup dengan damai dalam bingkai Persekutuan Malaysia. Atau dengan kata lain, Lee Kuan Yew tidak yakin bahwa Malaysia akan memberikan perlakuan yang sepadan antara Singapura dengan negara bagian yang lain. Lee menyatakan bahwa keraguannya juga didukung oleh istrinya Choo yang meragukan masa depan Singapura dalam Persekutuan Malaysia. Namun, Lee bermaksud memberikan kesempatan bergabung sesuai usulan Malaysia (The Strait Times Press, 2013).

Dalam proses membangun karir politiknya, Lee Kuan Yew dihadapkan pada pengalaman-pengalaman pahit melawan kaum Melayu yang mayoritas Muslim. Dari semenjak perang Dunia, hingga pada proses bersatu dan pisahnya Singapura dari Malaysia hingga membangun kenegaraan (*state building*) maupun membangun kebangsaan (*nation building*). Pengalaman sejarah Lee Kuan Yew telah membentuk citranya bahwa Islam adalah sebuah ancaman yang tidak bisa diabaikan, secara internal maupun eksternal. Pembuatan kebijakan luar negeri harus melihat Islam sebagai sebuah variabel penting.

Kebijakan-kebijakan Lee Kuan Yew untuk mengakomodasi kepentingan Muslim menunjukkan kekhawatirannya akan kerentanan posisi Singapura. Kerentanan tersebut, menurut para penulis terdahulu, disebabkan oleh faktor geopolitik di mana Singapura adalah negara yang sangat kecil, dan miskin sumber daya alam. Tulisan ini mencoba untuk menemukan bahwa kerentanan Singapura tidak hanya disebabkan oleh faktor geopolitik, tetapi juga oleh faktor identitas.

Konstruksi pemikiran Lee Kuan Yew atas Islam yang berbeda dengan Cina telah menempatkan Islam sebagai sebuah ancaman. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh berbagai rentetan peristiwa rivalitas antara Islam dengan Cina. Oleh karena itu, bagian ini ingin menampilkan konflik-konflik yang antara Etnis Cina dan Melayu (Muslim) yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya.

Kerusuhan Komunal Kasus Maria Hertogh

Pasca Perang Dunia II, terdapat proses konflik yang mengaitkan masalah agama di dalamnya, dalam hal ini adalah agama Islam. Kasus tersebut menyangkut seorang gadis keturunan Belanda Maria Hertogh. Maria Hertogh adalah anak dari Adeline Hunter dan Andrianus Petrus Hertogh, seorang tentara Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda Timur (Indonesia) dan bertempat tinggal di Cimahi. Setelah Belanda menyerah pada Jepang, Adrianus pindah ke Jepang sebagai *Prisoners of War* (POW). Karena suatu hal, maka Maria Hertogh kemudian ikut seorang Muslim Melayu, Aminah yang berasal dari Kota Kamaman, Malaysia yang tinggal di Bandung dan berprofesi sebagai penerjemah. Setelah Kemerdekaan Indonesia, Aminah kembali ke Malaysia dengan membawa Maria Hertogh. Di Malaysia, Maria Hertogh tumbuh sebagai seorang Muslim, serta berlogat Melayu (Aljunied, 2009).

Ketika Adrianus pulang ke Jawa, maka pencarian terhadap Maria Hertogh dimulai. Atas bantuan dari *Red Cross Society*, keberadaan Maria Hertogh mulai teridentifikasi. Proses pemulangan ternyata tidak berjalan mulus karena Aminah menolak mengembalikan gadis tersebut dengan uang tebusan tertentu. Apalagi Maria Hertogh juga tidak ingin kembali ke orang tuanya yang beragama Katolik. Pihak Adrianus membawa masalah ini ke pengadilan di Singapura. Peradilan pertama gagal. Peristiwa ini mulai menyedot perhatian umum setelah Maria Hertogh menikah dengan pemuda Melayu, Mansoor. Pernikahan ini dianggap kontroversial, karena Maria Hertogh dianggap terlalu muda dan belum melewati usia 16 tahun menurut undang-undang Belanda. Sementara itu, para pemimpin agama Islam

Melayu mulai menyumbangkan aspirasinya bahwa menurut hukum Syariah, wanita diizinkan menikah setelah mencapai pubertas. Mulailah terjadi dua kubu yang berselisih.

Peradilan kedua pun dilanjutkan, namun kali ini isu tentang Maria Hertogh telah menjadi isu internasional karena menyedot perhatian dari banyak kalangan luar negeri termasuk Pakistan, Indonesia, bahkan Arab Saudi. Peradilan ini menyatakan bahwa pernikahan Maria Hertogh dengan Mansoor tidak sah karena domisili Maria Hertogh adalah di Singapura dan Singapura adalah bagian dari Inggris dan berlaku hukum Inggris yang hanya membolehkan wanita menikah setelah berusia 16 tahun, serta Mansoor adalah warga Kelantan, bukan Singapura. Pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan bahwa Adrianus dan Adeline berhak atas pengasuhan Maria Hertogh dan berhak membawanya pulang ke Belanda. Ketidakuasan atas putusan ini melanda Singapura sehingga terjadi kerusuhan selama tiga hari mulai dari 11 Desember 1950. Dalam kerusuhan ini terdapat 18 korban tewas dan 178 lainnya terluka serta berbagai fasilitas umum dan pribadi dirusak (Aljunied, 2009).

Peristiwa ini sebenarnya terjadi sebelum Singapura mendapatkan kemerdekaannya. Meski demikian, hal ini dapat memberikan pelajaran tentang kekuatan Islam dalam merespon sebuah peristiwa yang menyangkut masalah-masalah yang primordial (agama dan etnis). Komunitas Muslim dalam hal ini dinilai mempunyai kekuatan yang signifikan untuk berurusan dengan persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan masalah identitas. Peristiwa ini merupakan salah satu benih dan inspirasi atas munculnya kerusuhan lain pasca kemerdekaan Singapura.

Peristiwa Usman dan Harun

Kasus Usman dan Harun sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia dan sekutunya yang merupakan kelanjutan dari penolakan Presiden Sukarno atas pembentukan Federasi Malaysia 1963. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap merupakan kelanjutan dari proyek neo-kolonialisme dan penjajahan yang baru. Suatu ketika dua orang prajurit TNI Usman dan Harun menyusup ke Singapura (bagian dari Malaysia) yang melakukan pengeboman di rumah Malcom MacDonald, seorang anggota *High Comisioner* Inggris di Asia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Maret 1965 yang menewaskan tiga orang, mencederai 30 orang dan menghancurkan rumah tersebut di Orchard Road (Kristanti, 2015).

Sementara itu Serda Harun dan Kopral Usman tertangkap kerana kapalnya kehabisan bahan bakar dan dijatuhi hukuman mati. Peristiwa ini seperti selayaknya serangan teror belaka, namun hal ini adalah bagian dari skenario konfrontasi Malaysia. Serangan ke rumah Malcom MacDonald tersebut memang terencana sebagai salah satu strategi perang dengan sabotase dan operasi intelijen. Serangan ini dimaksudkan untuk menimbulkan kepanikan dan memberikan peringatan kepada Singapura, Malaysia, maupun Inggris akan ketegasan Indonesia. MacDonald adalah seorang anak mantan Perdana Menteri di Inggris, Ramsay MacDonald yang sekaligus anggota *British High Commisioner* untuk Asia. Malcom MacDonald juga pernah mencetuskan gagasan pembentukan federasi Singapura, Sabah-Serawak.

Peristiwa yang tadinya merupakan bagian dari bingkai hubungan Indonesia-Malaysia berubah menjadi urusan hubungan Indonesia-Singapura karena Singapura melanjutkan proses hubungan Usman dan Harun. Tahun 1968, pengadilan Singapura menjatuhkan hukuman eksekusi mati kepada Usman dan Harun. Reaksi masyarakat di Jakarta pun kian memanas, Kedutaan Besar Singapura di Jakarta diserbu demonstran yang menggunakan bambu runcing (Kristanti, 2015). Hubungan keduanya mulai mendingin ketika Lee Kuan Yew berkunjung ke Indonesia dan melakukan *tabor bungan* di makan Usman dan Harun.

Kerusuhan Komunal Pasca Pemilu

Sejalan dengan itu, terdapat pula kerusuhan rasial yang melanda Singapura pada tahun 1964 yang

juga melibatkan label 'Islam' di dalamnya. Kerusuhan ini berlatarbelakang naiknya tensi kompetisi antara Etnis Melayu dan Etnis Cina di Singapura. Bermula dari pemilihan umum federasi Malaysia tahun 1963 di mana PAP menyapu bersih semua kursi di parlemen Singapura. Sementara itu, partai *United Malays National Organisation* (UMNO) Singapura (SUMNO) gagal merebut satu kursi pun. Tunku Abdul Rahman sebenarnya menjamin keamanan atas kemenangan PAP serta menjamin bahwa Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO tidak berperan dalam perpolitikan di Singapura.

Meskipun demikian, Sekretaris Jenderal UMNO, Syed Ja'far Albar tidak setuju dengan kompromi politik yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman. Ia mulai menggalang opini melalui surat kabar *Utusan Melayu*, serta menggalang pertemuan di Pasir Panjang. Dalam pertemuan massal tersebut Ja'far Albar menuduh bahwa Lee Kuan Yew telah melakukan tekanan terhadap kaum Melayu di Singapura, dan menyerukan kepada kaum Melayu untuk memboikot pertemuan PAP di masyarakat Melayu.

Pada perayaan Maulid Nabi 21 Juli 1964 yang dihadiri 2.000 orang, mulailah kerusuhan itu muncul. Bentrokan antara Etnis Cina melawan Muslim Melayu pun pecah di Padang hingga daerah sekitar Kalang Road dan Kampong Soo Poo. Akibat bentrokan rasial ini empat orang tewas dan 178 lainnya menderita luka (Han, 2005).

Kerusuhan kembali terulang pada bulan September tahun yang sama. Kali ini pemicunya adalah misteri terbunuhnya Muslim Melayu yang berprofesi sebagai *trishaw rider*. Kerusuhan mulai pecah pada tanggal 2 September melanda di daerah Geylang Serai. Akibat kerusuhan ini, 23 orang tewas, 454 luka-luka, lebih dari 3.000 orang ditahan dan ratusan di antaranya diadili (Han, 2005).

Sama halnya seperti kerusuhan yang terjadi sebelumnya, kerusuhan yang terjadi pada tahun 1964 ini juga mewakili kerusuhan antara Melayu (Muslim) melawan Cina sebagai etnis mayoritas di Singapura. Artinya, aktivitas kelompok Melayu Muslim ini semakin menampilkan citra negatif di mata orang-orang Cina, termasuk Lee Kuan Yew. Melayu (Muslim) seolah-olah muncul sebagai kelompok yang cenderung arogan dan suka pada penggunaan kekerasan. Selain itu, kerusuhan yang muncul selalu berkaitan pada masalah kompetisi politik antarkeduanya.

Pada tahun 1969, sebenarnya terjadi hal serupa, namun kali ini terjadi tidak di Singapura melainkan di Malaysia. Polanya tetap sama yakni Melayu (Muslim) melawan Cina. Meskipun tidak terjadi di Singapura, tetapi hal ini memberikan stigma yang sama akan eksistensi dan karakter Melayu. Seperti diketahui bahwa komposisi penduduk Malaysia berbeda dengan Singapura di mana Malaysia terdiri dari 55 persen Melayu, 35 persen Cina dan 10 persen India. Pola hubungan konflikturnya masih sama yakni pertentangan antara dua identitas yang berbeda yakni Cina-Melayu. Pemicu kerusuhan tersebut bisa saja berupa kesenjangan politik atau kesenjangan ekonomi, tetapi muaranya tetaplah sama yakni identitas kebangsaan yang berbeda.

Berbagai kerusuhan yang selalu melibatkan Islam Melayu tersebut pada akhirnya membentuk persepsi Lee Kuan Yew bahwa Komunitas Islam merupakan masalah bagi Singapura. Komunitas Islam adalah kelompok yang terbelakang, sulit bersatu dan berintegrasi dalam pembangunan bangsa. Dalam buku otobiografinya yang sangat populer, Lee Kuan Yew membeberkan pandangannya tentang Islam dalam hubungannya dengan integrasi Singapura.

I think we were progressing very nicely until the surge of Islam came, and if you asked me for my observations, the other communities have easier integration - friends, intermarriages and so on, Indians with Chinese, Chinese with Indians - than Muslims. That's the result of the surge from the Arab states. ... I would say today, we can integrate all religions and races except Islam. ... I think the Muslims socially do not cause any trouble, but they are distinct and separate (Bolt: 2011).

Pernyataan tersebut, menggambarkan hasil observasinya yang cukup lama dan belum terekspresikan sebelumnya. Ini adalah bukti bagaimana persepsi negatif Lee Kuan Yew tentang Islam dalam kehidupan

berbangsa di Singapura, yang dalam pandangannya sulit untuk berintegrasi sebagaimana Cina, India, atau etnis lain selain Melayu Islam. Oleh karenanya, dalam kaitan ini Muslim Melayu adalah beban bagi pembangunan di Singapura.

Pengaruh Islam dalam Politik Luar Negeri Singapura

Berbagai pengalaman dan tekanan tersebut di atas, mengharuskan Singapura untuk mempertimbangkan aspek Islam dalam berbagai kebijakan luar negerinya. Pada bagian ini, akan dibahas tentang kebijakan luar negeri Singapura terhadap Malaysia dan Indonesia. Dua negara ini menjadi representasi komunitas Islam di luar Singapura mengingat mayoritas penduduk kedua negara adalah Islam. Islam di kedua negara tersebut juga mempunyai hubungan dengan Islam yang berada di Singapura. Berbagai kasus yang merugikan posisi Islam di Singapura, mendapat reaksi dari pemerintah maupun warga negara di kedua negara. Oleh karenanya, mengambil variabel Malaysia dan Indonesia menjadi sangat penting untuk memaparkan kebijakan luar negeri Singapura.

Komunitas Islam di Singapura yang semakin signifikan jumlahnya, sering mendapatkan perlakuan yang merugikan oleh kelompok mayoritas di Singapura. Beberapa kerusuhan yang terjadi telah disikapi secara signifikan oleh kelompok Islam Malaysia dan Indonesia. Oleh karenanya, posisi Islam di Singapura meskipun kecil, mendapatkan sorotan dari Malaysia dan Indonesia. Pada tataran inilah Islam menjadi variabel penting dalam kebijakan luar negeri Singapura.

Perlakuan yang tidak baik terhadap kaum minoritas Muslim di Singapura, tentu saja akan menimbulkan reaksi dan kemarahan di Malaysia maupun di Indonesia. Sikap akomodatif terhadap kepentingan kelompok Islam dianggap akan dapat meredam sikap konfrontatif dari Malaysia maupun Indonesia. Oleh karenanya, Pemerintah Singapura perlu memberikan perlakuan khusus terhadap Islam di negaranya demi memperbaiki hubungannya dengan Malaysia dan Indonesia.

Jaminan Eksistensi Komunitas Islam di Dalam Negeri

Pemerintah Singapura membuat berbagai kebijakan yang akomodatif untuk menjamin eksistensi Muslim Melayu di Singapura. Jaminan ini meliputi pencantuman kata 'Melayu' dalam konstitusi dan serangkaian kebijakan domestik yang bersifat '*Islam friendly*.' Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, Singapura adalah sebuah negara yang didominasi oleh Etnis Cina (76 persen), sedang Etnis Melayu sekitar 14.3 persen, India 7 persen dan sisanya adalah berbagai etnis lain. Dari fakta tersebut, Singapura menetapkan dirinya sebagai sebuah negara multikultur dan multi etnis. Artinya, meskipun mayoritas etnis adalah Cina, namun eksistensi semua etnis pada dasarnya sama di depan hukum atau undang undang.

Dalam konstitusi, persamaan di depan hukum tersebut tercantum dalam pasal 12 ayat 1 dan 2 konstitusi 1965.

(1) All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law. (2) Except as expressly authorized by this Constitution, there shall be no discrimination against citizens Singapore on the ground only of religion, race, descent or place of birth in any law or in the appointment any office or employment under a public authority or in the administration of any law relating to the acquisition, holding, or disposition of property or the establishing or carrying on of any trade, business, profession, vocation or employment (Singapore's Constitution 1965, article 12).

Demikian juga dengan persoalan agama, Singapura tidak memberikan privilese untuk agama tertentu, melainkan semua diperlakukan sama. Pasal 15 mengatur masalah tersebut. "*Every person has the right to profess and practice his religion and to propagate it*" (Singapore's Constitution 1965, article 15).

Meskipun demikian, terdapat posisi yang sangat istimewa bagi Etnis Melayu yang hanya berjumlah 14.3 persen. Terdapat pasal yang memberikan kedudukan istimewa bagi Etnis Melayu sebagaimana yang dimuat dalam pasal 152. Pasal yang mengatur posisi minoritas tersebut, menyatakan:

(1) It shall be the responsibility of the Government constantly to care for the interests of the racial and religious minorities in Singapore. (2) The Government shall exercise its functions in such manner as to recognize the special position Malays, who are the indigenous people of Singapore, and accordingly it shall be the responsibility of Government to protect, safeguard, support, foster, and promote their political, educational, religious, economic, social, and cultural interests and the Malay language (Singapore's Constitution 1965, *article 152*).

Berbagai kebijakan yang '*Islamic friendly*' pun digulirkan demi mengakomodasi tekanan Malaysia. Misalnya adalah pemberlakuan hukum Islam (AMLA) tahun 1966, yang merupakan muara dari lahirnya Majelis Ugama Islam Singapura tahun 1968, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) mempunyai kewenangan untuk mengatur perihal kebutuhan umat Islam. Pertama adalah fungsi administratif yang mengurus persoalan zakat, wakaf, haji, dan sertifikasi halal. Kedua mempunyai tugas untuk membangun Masjid, ketiga pengurusan Madrasah, keempat mengeluarkan fatwa, dan kelima adalah menyalurkan donasi bagi yang membutuhkan (orang miskin). Sebagai sebuah contoh dari hasil karya MUIS misalnya adalah di Singapura telah terdapat lebih dari 70 Masjid, masih dipertahankan enam sekolah Islam (Madrasah), sertifikasi halal, dan diijinkannya perbankan syari'ah.

Kebijakan Luar Negeri terhadap Malaysia

Pada bagian lain Singapura juga bersikap akomodatif terhadap Malaysia. Eksistensi Singapura yang rentan, dan kerumitan hubungan dengan Malaysia, memberikan pengaruh pada pola akomodasi kepentingan kedua belah pihak. Di antara akomodasi kepentingan tersebut misalnya adalah perizinan penggunaan fasilitas militer di Singapura oleh Malaysia, dan penguasaan tanah di sekitar Kereta Api Tanah Melayu (KTM).

Meskipun telah resmi menjadi sebuah negara yang merdeka, Singapura masih mempunyai beberapa persoalan yang bisa melukai kedaulatannya. Di antaranya adalah keharusan Singapura untuk menyisakan sebagian dari kedaulatannya untuk menerima kehadiran pasukan Malaysia di negerinya. Kehadiran militer sebuah negara di negara lain sebenarnya merupakan hal yang dilarang kecuali oleh karena perjanjian tertentu atau dalam kerangka kerjasama keamanan.

Walaupun telah mendapatkan kemerdekaannya dari Malaysia, Pemerintah Singapura harus memberikan ruang demi penempatan pasukan Malaysia di Singapura. "*Singapore will give the Malaysian Government the right to continue to maintain the bases and other facilities used by its military forces in Singapore and will allow Malaysia to use these bases and facilities as the Malaysian Government may consider necessary*" (Soon, 1969).

Selain itu Singapura juga harus merelakan sebagian wilayahnya dikuasai Malaysia, khususnya pada jalur rel kereta api, 'Kereta api Tanah Melayu.' Malaysia masih menguasai tanah di sepanjang rel KTM seluas 200 hektar yang melintasi tiga stasiun yakni Woodland, Bukit Timah dan Tanjung Pagar (Ganesan, 1999). Rel kereta ini telah beroperasi sejak era kolonial Inggris pada tahun 1918 yang melintasi kawasan Singapura sepanjang 20 km.

Kebijakan Terhadap Indonesia

Hubungan Indonesia-Singapura mengalami keretakan semenjak Singapura masih bergabung dengan Malaysia. Kebijakan Ganyang Malaysia telah menyeret Singapura ke dalam pusaran konflik kedua negara. Pasalnya adalah, strategi sabotase yang dilakukan oleh Indonesia melalui serangan terhadap rumah MacDonald di Singapura, tidak berjalan mulus. Usman dan Harun, dua tentara Indonesia yang

melakukan serangan tersebut, tertangkap oleh Malaysia. Pasca lepasnya Singapura dari Malaysia, Singapura melanjutkan proses hukuman kepada Usman dan Harun yang berakhir pada keputusan hukuman mati. Akhirnya keduanya dieksekusi hukuman gantung pada 1968. Reaksi masyarakat Indonesia kian panas.

Menyadari pentingnya hubungan dengan Indonesia, Lee Kuan Yew mencoba memperbaiki hubungan dengan rencana kunjungan ke Indonesia. Upaya rekonsiliasi ini awalnya ditanggapi dingin oleh Soeharto, dengan mengajukan syarat, boleh berkunjung ke Jakarta tetapi harus melakukan tabung bunga di taman makam Usman dan Harun, dua prajurit yang digantung di Malaysia. Pragmatisme Lee Kuan Yew muncul mengalahkan segala prestisiusnya seorang pemimpin dengan menyetujui syarat yang ditawarkan oleh Indonesia. Lee Kuan Yew mengunjungi Indonesia pada bulan Mei 1973. Pendekatan ini menandai era rekonsiliasi hubungan antara Indonesia dengan Singapura.

Pasca pertemuan tersebut, Indonesia dan Singapura saling membantu dalam persoalan pangan. Itikad baik Soeharto dalam mengembalikan pinjaman beras disambut antusias oleh Lee Kuan Yew dengan mengatakan bahwa Soeharto adalah orang yang bisa dipercaya (Strait Times, 2015). Tahun-tahun berikutnya adalah masa-masa keemasan hubungan antara Indonesia dengan Singapura.

Hubungan yang retak antara Indonesia dan Singapura pasca dijatuhkannya hukuman mati untuk Usman dan Harun mulai mereda dengan kesanggupan Lee Kuan Yew berziarah ke makam Usman dan Harun di Kalibata Jakarta. Sebenarnya, sikap Lee Kuan Yew ini dapat diterjemahkan sebagai pengakuan bahwa Usman dan Harun tidak bersalah. Tetapi demi hubungan baik dengan Indonesia, permintaan tersebut tetap dikabulkan oleh Lee Kuan Yew.

KESIMPULAN

Paparan di atas menunjukkan kerentanan Singapura terhadap Islam dan betapa penting untuk mengakui eksistensinya dalam pembuatan kebijakan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kerentanan tersebut sebenarnya bukan saja pada sisi geopolitik seperti yang diperkenalkan oleh Mithel Leifer, tetapi kerentanan juga terjadi karena persoalan ideologis yakni Islam.

Dari beberapa studi kasus menunjukkan bahwa konflik ideologi memunculkan pertentangan antara etnis mayoritas Cina dan Melayu yang kemudian berimbas pada persoalan politik. Tak hanya persoalan dalam negeri, perbedaan ini juga terlihat bagaimana negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia dalam merespon kebijakan luar negeri Singapura. Seperti dalam kasus pemberian hukuman gantung terhadap Kopral Usman dan Harun, terpidana dalam kasus pengeboman, yang menuai kerenggangan hubungan dengan negara-negara sekitar Singapura terutama Indonesia.

Pengalaman hidup dalam proses politik yang sedemikian sulit ini, membentuk citra, pola pikir para pemimpin Singapura, bahwa Islam yang terwakili oleh Muslim Melayu, Malaysia maupun Indonesia, merupakan ancaman potensial terhadap Singapura. Islam menjadi variabel penentu dalam proses pembuatan kebijakan politik di Singapura. Pengabaian atas eksistensi Islam, akan membahayakan keberadaan Singapura. Situasi ini diperburuk oleh kekhawatiran berbagai pihak tentang kebangkitan Islam di Asia Tenggara, di mana di Indonesia, Malaysia, Filipina, maupun Thailand, pada saat tersebut menunjukkan gejala masif kebangkitannya.

Merespon hal-hal tersebut Singapura mengambil kebijakan akomodatif yang dimanifestasikan dalam kebijakan ramah Islam atau '*Islam friendly*.' Lebih lanjut, Pasal 15 ayat 2 dari Konstitusi Singapura memberikan hak istimewa pada etnis Melayu sebagai penduduk asli, dan pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan dan dukungan serta memajukan kepentingan politik, pendidikan, ekonomi, agama, dan budayanya. Bahkan pada pasal ini memuat pengakuan akan perlindungan terhadap eksistensi bahasa Melayu. Hal ini merupakan suatu perlakuan khusus di mana mayoritas penduduk Singapura justru merupakan etnis Cina.

Dalam konteks seperti ini maka kebijakan-kebijakan Singapura didesain sedemikian ramah terhadap Islam. Kebijakan politik di dalam negeri maupun kebijakan luar negerinya selalu mempertimbangkan eksistensi Islam baik yang ada di Singapura maupun di negara tetangganya. Pola-pola akomodatif terhadap Malaysia dan Indonesia harus dilakukan oleh Singapura demi menjaga hubungan baik antara ketiganya.

REFERENSI

- Aljunied, S. M. K. (2006). Making Sense of an Evolving Identity: A Survey of Studies on Identity and Identity Formation among Malay-Muslim in Singapore. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 26(3), December.
- Aljunied, S. M. K. (2009). Beyond the Rhetoric of Communalism: Violence and the Process of Reconciliation in 1950s Singapore. Dalam *Reframing Singapore: Memory, Identity, Trans-Regionalism*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Aljunied, S. M. K. (2009). British Discourse and Malay Identity in Colonial Singapore. *Indonesia and Malay World*, 37(107), March.
- Anungrah, B. (2016). Faktor Ideosinkratik Pemimpin dalam Perumusan Politik Luar Negeri. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 26, Juni.
- Bakri, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bolt, A. (2011). Singapore's Lee: We Can't Integrate Muslims. *Herald Sun*, February.
- Chanlett-Avery, E. (2010). Singapore: Background and U.S. Relations. *Congressional Research Service*, March.
- Chee, C. H. (1969). Singapore's Foreign Policy 1965-1968. *Journal of Southeast Asian History*, 10(1), Singapore Commemorative Issue 1819-1968.
- Chong, A. (2015). Lee Kuan Yew and Singapore's Foreign Policy: A Productive Iconoclasm. *RSIS Commentary*, (6), March 2015.
- Clammer, J. (1981). Malay Society in Singapore: A Preliminary Analysis. *Southeast Asian Journal of Social Science*, 9(1).
- Dougherty, J. E. & Pflaugh, R. L. (2001). *Contending Theories of International Relations*. New York: Addison Wesley Longman Inc.
- Ganesan, N. (1992). Singapore's Foreign Policy Terrain. *Asian Affairs*, 19(2), Summer.
- Haikal, H. & Yahaya, A. G. (1996). Muslim Organization in Singapore: An Historical Overview. *Islamic Studies*, 35(4), Winter.
- Han, J. (2005). Communal Riots of 1964. Diakses 9 Desember 2015 dari http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_45_2005-01-06.html
- Holsti, O. R. (1962). The Belief System and National Images: A Case Study. *Conflict Resolution*, 4(3).
- Kamsi. (2017). *Pergolakan Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Calpulis.
- Klingler-Vidra, R. (2012). The Pragmatic 'Little Red Dot': Singapore's US Hedge Against China. *LSE Research Online*. <http://eprints.lse.ac.uk/47506/>
- Kristanti, E. Y. (2015). 0-3-1965: Usman Harun dan Pengeboman MacDonald House Singapura. *liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/global/read/2187823/10-3-1965-usman-harun-dan-pengeboman-macdonald-house-singapura>
- Leifer, M. (2000). *Singapore Foreign Policy: Coping with Vulnerability*. London: Routledge.
- Muthalib, H. (1990). Islamic Revivalism in Asean States: Political Implication. *Asian Survey*, 30(9), September, pp. 877-891.
- Muzani, S. (1993). *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Ed.). Jakarta: LP3ES.
- Plano, J. C. & Olton, R. (1967). *International Relations Dictionary*. New York: Holt Reinhart.
- Rahim, L. Z. (1998). *The Singapore Dilemma: The Political and Educational Marginality of Malay Community*. New York: Oxford University Press.
- Sadasivan, B. (2007). Singapore's Foreign Policy. *Estudios Internacionales*, 40(157), Abril-Agosto 2007.
- Soon, L. T. (1969). Malaysia-Singapore Relations: Crisis Adjustment, 1965-1968. *Journal of Southeast Asian History*, 10(1), March.

- Sudrajat, A. (2015). Perkembangan Islam di Singapura. *Kertas Kerja Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY*. Diakses 13 Februari 2019 dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/penelitian/Perkembangan+Islam+di+Singapura.pdf>
- Tan, A. T. H. (1999). Singapore Defense: Capabilities, Trends, and Implications. *Contemporary Southeast Asia*, 21(3), December.
- The Straits Time. (2013). *One Man View of the World: Lee Kuan Yew*. Singapore: The Straits Times Press.